

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengesahan (Presiden RI 2015) mengubah sistem pemerintahan Indonesia yang semula menganut Sentralisasi menjadi Desentralisasi, hal ini pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahannya dengan asumsi pemerintah daerah jauh lebih mengetahui keadaan daerahnya masing – masing daripada pemerintah pusat namun tetap atas izin dari pemerintah pusat serta pemerintah pusat melakukan pemantauan segala kegiatan yang dilakukan oleh daerah. Hal tersebut menjadi latar belakang pemerintah mengesahkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengenai Pemerintahan Daerah. Terdapat mekanisme peralihan kepemimpinan daerah ini guna menjadi penunjang terlaksananya otonomi daerah di Indonesia. Dengan terbaginya kekuasaan ini, diharapkan baik pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah lebih akuntabel dan transparan dalam kinerjanya atau pun dalam keuangannya. Merupakan upaya nyata baik pemerintah pusat maupun daerah dalam pertanggungjawaban serta transparansi, dan wajib baginya menyampaikan pengelolaan keuangan negara maupun daerah sebagai laporan pertanggungjawaban dengan tepat waktu.

Sejalan dengan (Presiden RI 2004) bahwa

perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan pembagian keuangan dengan memperhatikan sistem keadilan, transparan, profesional, demokratis, serta efisien untuk mendanai terselenggaranya pemerintahan daerah, dengan memperhatikan kebutuhan daerah, potensi yang dimiliki, serta kondisi daerah tersebut dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Adanya regulasi ini, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola daerahnya sendiri tanpa bergantung dengan pusat dalam menjalankan pemerintahannya dimana pusat hanya mengontrol, mendanai dan meminta pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang diselenggarakan oleh daerah namun tetap regulasi pemerintah pusat dijadikan sebagai tolok ukur pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya.

Begitu juga dengan (PP RI 2019), seperti yang kita ketahui, bahwa keuangan daerah merupakan segala kewajiban dan hak daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah serta dinilai dengan uang dan jadi milik daerah semua kekayaannya apabila memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak daerah yang bersangkutan. Adanya keuangan daerah tersebut, memudahkan pemerintah daerah untuk membiayai seluruh kebutuhan baik kebutuhan daerahnya ataupun masyarakatnya. Dalam mengelola keuangan daerah biasanya meliputi perencanaan, pelaporan, pengawasan dan pengelolaan.

Pada dasarnya pemerintah daerah membagi dalam dua tingkatan, yaitu pada tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur beserta wakilnya sedangkan tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh bupati beserta wakilnya, namun untuk wilayah kota dipimpin oleh walikota beserta wakilnya. Kedudukan kecamatan dalam organisasi

berada dibawah naungan pemerintah daerah. Sebagaimana dalam (PP RI 2018). Kecamatan merupakan salah satu bagian dari daerah kabupaten/kota dimana kecamatan ini dipimpin oleh seorang camat dengan berbagai prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Persyaratan teknis pembentukan kecamatan ini juga dilihat dari kemampuan kecamatan itu sendiri baik dari segi pengelolaan keuangan daerah, pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan, dan persyaratan lainnya yang menunjang.

Dalam pengelolaan keuangan daerah salah satu indikator kinerja dapat dinilai melalui serapan anggarannya, dengan menilai seberapa besar anggaran yang terserap dalam memenuhi kebutuhan daerah maupun masyarakatnya hal tersebut menjadi gambaran bagi kualitas dan kinerja daerah bersangkutan sebagai pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang terencana.

Sejalan dengan (PP RI 2006) pada dasarnya laporan keuangan masing – masing SKPD yang dibuat, digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Di mana SKPD ini merupakan lembaga atau organisasi dalam pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab kepada gubernur atau bupati ataupun walikota untuk menyelenggarakan pemerintahan. SKPD ini meliputi sekretaris daerah, lembaga teknis dan dinas daerah, Kecamatan, dan Salpol pp disesuaikan dengan kebutuhan tiap – tiap daerah. Adapun laporan keuangan tiap – tiap kecamatan yang peneliti dapatkan dari Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka, sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Anggaran serta Realisasi Belanja Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2022

No	Nama Kecamatan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Cingambul	2.616.036.917,00	2.610.984.238,00	99,81
2	Banjaran	2.583.067.125,00	2.575.220.815,00	99,70
3	Bantarujeg	2.328.270.185,00	2.213.682.847,00	99,33
4	Kadipaten	2.555.863.684,00	2.525.377.021,00	98,81
5	Argapura	2.732.131.190,00	2.690.264.945,00	98,47
6	Dawuan	2.558.111.880,00	2.512.151.030,00	98,20
7	Sindangwangi	2.587.117.649,00	2.537.972.028,00	98,10
8	Leuwimunding	2.486.704.048,00	2.437.916.850,00	98,04
9	Malasma	2.628.463.728,00	2.569.181.195,00	97,74
10	Sumberjaya	2.345.973.434,00	2.276.512.036,00	97,04
11	Sindang	2.715.585.081,00	2.631.927.380,00	96,92
12	Majalengka	20.972.548.669,00	20.322.842.006,00	96,90
13	Lemahsugih	2.333.878.501,00	2.260.049.118,00	96,84
14	Cigasong	8.223.677.025,00	7.961.760.810,00	96,82
15	Jatiwangi	3.209.148.201,00	3.104.550.049,00	96,74
16	Talaga	2.861.445.405,00	2.757.958.797,00	96,38
17	Kasokandel	2.510.614.157,00	2.415.632.423,00	96,22
18	Maja	2.765.888.802,00	2.652.605.184,00	95,90
19	Cikijing	2.545.527.415,00	2.405.256.349,00	94,49
20	Palasah	2.606.267.169,00	2.447.983.696,00	93,93
21	Kertajati	3.142.594.031,00	2.949.712.093,00	93,86
22	Rajagaluh	3.019.399.574,00	2.809.594.669,00	93,05
23	Ligung	3.348.325.851,00	3.113.151.055,00	92,98
24	Jatitujuh	3.074.764.988,00	2.851.204.265,00	92,73
25	Sukahaji	2.621.685.317,00	2.426.446.820,00	92,55
26	Panyingkiran	2.419.892.330,00	2.234.714.641,00	92,35

Sumber : Kantor BKAD Kabupaten Majalengka

Berlandaskan pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga sebagai acuan untuk mengukur

kinerja dalam mengimplementasikan perencanaan anggaran serta kualitas dalam melaksanakan anggaran tersebut. Kategori penilaiannya sebagai berikut (Keuangan 2023) :

1. Sangat baik, ketika nilai mencapai >95
2. Baik, ketika nilai mencapai >89 sampai <95
3. Cukup, ketika nilai mencapai >70 sampai <89
4. Kurang, ketika nilai mencapai >70

Untuk Kabupaten Majalengka sendiri memiliki 26 kecamatan. Dimana Kecamatan Cikijing ini merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Dari sekian misi Kabupaten Majalengka salah satunya pengembangan perekonomian rakyat dengan basis agribisnis serta reformasi birokrasi dalam memenuhi pelayanan umum. Dimana Kecamatan Cikijing ini merupakan salah satu kecamatan yang ikut serta dalam mewujudkan salah satu misi dari Kabupaten Majalengka, misi ini diwujudkan oleh Kecamatan Cikijing dalam program – program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dari Kecamatan Cikijing sendiri. Dalam pelaksanaannya program tidak akan berjalan apabila anggaran tidak mendukung, sehingga anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka sangatlah penting bagi Kecamatan Cikijing dalam menjalankan programnya.

Anggaran yang diperoleh Kecamatan Cikijing digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kantor, melaksanakan program kegiatan dan kebutuhan – kebutuhan lainnya. Serta anggaran tersebut diwujudkan dalam laporan keuangan. Dimana laporan keuangan pemerintah daerah ini memiliki bagian – bagian, salah satunya yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA memiliki informasi yang biasanya

digunakan untuk mengevaluasi kinerja SKPD ataupun pemerintah untuk menilai ketaatan pelaporan dan mengukur penggunaan anggaran.

Untuk Kecamatan Cikijing sendiri, pada dasarnya membuat laporan keuangan yang salah satunya meliputi Laporan Realisasi Anggaran. LRA yang dibuat Kecamatan Cikijing berisi mengenai anggaran yang dianggarkan serta realisasi belanjanya. Anggaran yang dianggarkan oleh Kecamatan Cikijing selalu tidak terealisasi secara penuh setiap tahunnya atau dengan kata lain anggaran Kecamatan Cikijing tidak terserap secara maksimal. Dapat kita lihat pada tahun 2021 anggaran yang terserap mencapai 98,58%, sedangkan pada tahun 2022 anggaran yang terserap hanya mencapai 94,49%. Dari LRA ini dapat kita lihat berapa besar anggaran yang terserap yang dicairkan untuk melaksanakan program kegiatan SKPD. Berhubungan dengan hal tersebut, demi memudahkan pemahaman dapat dilihat dalam tabel :

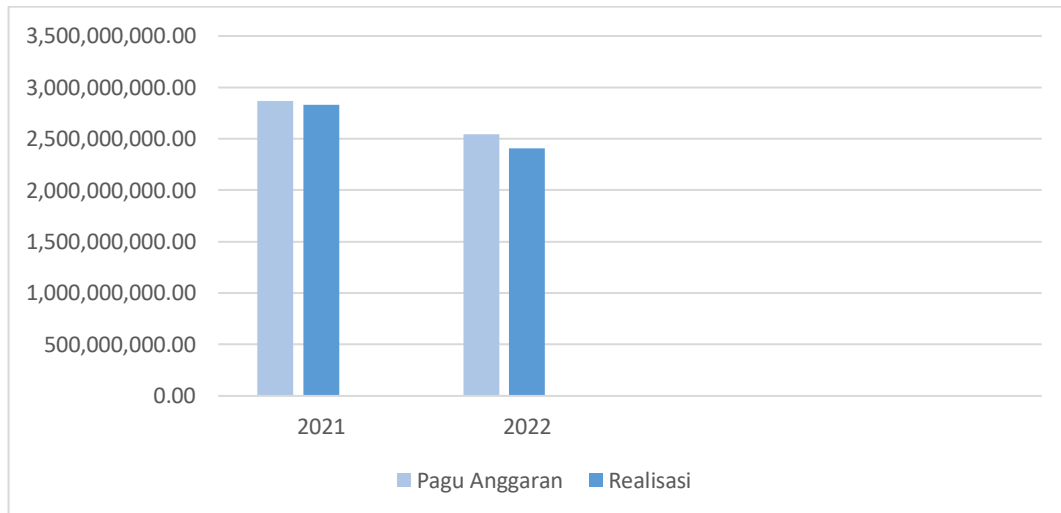
Tabel 1. 2
Anggaran serta Realisasi Belanja Kantor Kecamatan Cikijing
Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2022

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	(%)
2021	Rp2.948.983.912,00	Rp2.829.565.892,00	98,58%
2022	Rp2.545.527.415,00	Rp2.405.256.349,00	94,49%

Sumber : Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka

Dari tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa anggaran serta realisasi belanja Pada Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dari tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami penurunan baik dari segi anggaran yang diterima hingga persentase anggaran yang terserap. Berdasarkan grafik yang dibuat dibawah ini, dapat dilihat penyesuaiannya :

Gambar 1. 1
Grafik Anggaran serta Realisasi Belanja Kecamatan Cikijing Kabupaten
Majalengka 2021 – 2022



Sumber : Data (Diolah Peneliti), 2023

Dilihat dari gambar grafik 1.1 mengenai anggaran yang terserap di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka terendah ada pada tahun 2022 dengan anggaran yang terserap sebesar 94,49%, hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya perubahan atau penyesuaian anggaran di tengah perjalanan. Dimana pada saat itu adanya miskomunikasi anggara. Hal ini sejalan dengan pendapat informan dari pak YED. Selaku Kasubag PEP dan Keuangan di Kecamatan Cikijing :

“Mungkin kendala di perencanaannya, kalau bendaharakan sesuai DPA, kita kan DPA nya kan liat-liat, teu masuk akal kan nya, tidak berani menyerap kan. Jadi anggaranna masuk deui ka negara kan kitu. Bukan kegiatan sebenarnya. Jadi.. penyerapan anggaranya cenderung bermasalah di perencanaannyalah. Rencananya sih buat taman disana (menujuk halaman depan kantor), tapi tanggung untuk Empat Puluh Jutaan mah hanya menang naonkan. Maksudna memang teu sesuai banget lah”. Wawancara dilakukan pada 11 Agustus 2023, 09.23 WIB. Bertempat di Kantor Kecamatan Cikijing

Pada dasarnya perencanaan anggaran tidak hanya dibuat berdasarkan keinginan yang berlandaskan pada kebutuhan saja, akan tetapi dalam pembuatannya memerlukan perhitungan yang matang. Untuk beberapa hal

memang memerlukan stakeholder yang ahli dibidangnya, meskipun diluar dari anggota Kecamatan Cikijing. Wawancara diatas pun dibenarkan oleh informan WAJ selaku Sekcam Cikijing

“Diperencanaan awal ada alokasi untuk pembuatan taman, kemudian diperubahan tetap kode rekening tersebut, tapi tidak disesuaikan dengan jeda waktunya. Kebutuhannya tidak disesuaikan dengan batas waktu satu minggu itu tidak akan mungkin selesai tidak akan mungkin bisa dieksekusi. Kecuali untuk pemeliharaan gedung. Diproses perubahan parsial itu dialihkan kode rekeningnya bukan untuk belanja bahan baku, tapi untuk pemeliharaan gedung”. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2023, 10.40 bertempat di Kantor Kecamatan Cikijing.

Pada dasarnya perencanaan itu adalah identik dengan keinginan. Akantetapi keinginan itu harus sesuai dengan regulasi. Ada tahapan sebuah perencanaan. Ada perencanaan awal, kemudian dipertengahan itu ada perubahan anggaran hal ini bisa dilakukan apabila ada perubahan anggaran yang akan digunakan. Bisa karena waktu yang tidak memungkinkan atau anggarannya yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Untuk lebih mempermudah pemahaman, peneliti menampilkan rincian anggaran realisasi capaian kerja Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka seperti dibawah ini :

Tabel 1. 3
Perbandingan Anggaran Realisasi Kerja serta Capaian Kerja Pada
Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka tahun 2022

Program Kegiatan	Target	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	2.338.663.415	2.211.075.429
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13.837.500	13.747.500
Administrasi keuangan perangkat daerah	1.930.412.367	1.858.299.829
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	16.500.000	16.374.600
Administrasi umum perangkat daerah	173.390.900	166.188.634

Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	58.000.000	57.942.000
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	78.533.248	63.618.125
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	67.898.400	34.904.741
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	64.897.500	63.372.500
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	31.390.000	31.390.000
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	30.182.500	28.782.500
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	3.325.000	3.200.000
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	8.925.000	7.075.000
Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	8.925.000	7.075.000
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	10.125.000	9.750.000
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	10.125.000	9.750.000
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	89.600.000	89.341.920
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugahan kepala daerah	89.600.000	89.341.920
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	33.316.500	24.641.500
Fasilitas, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	33.316.500	24.641.500

Sumber : LAKIP Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka

Dari tabel 1.3 dapat kita lihat. Untuk anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki selisih lebih dari Seratus Juta yang tidak terserap. Hal ini seperti yang dipaparkan diatas berdasarkan wawancara dari Pak Yedi Herdianto, A.Md selaku Kasubag PEP Kecamatan Cikijing dan pak Wawan Juhawan, S.IP. Serapan anggaran yang tidak terealisasi hingga mencapai seratus juta ini salah satunya karena ada kegiatan untuk pembangunan taman di halaman depan kantor Kecamatan Cikijing yang tidak jadi dilaksanakan. Sehingga silpa yang dihasilkan pun cukup besar untuk dikembalikan kepada pemerintah

daerah. Berdasarkan permasalahan yang sudah mulai terlihat yaitu belum optimalnya penyerapan anggaran di Kecamatan Cikijing untuk tahun 2022 khususnya pada perencanaan anggarannya hal ini karena masih adanya permasalahan dalam pengkodean rekening belanja dan adanya ketidakteelitian dalam penentuan gaji. Pada saat pembahasan anggaran bersama dengan BKAD tidak semua program *goal* dalam satu hari dan pada saat pembahasan anggaran bersama BKAD tidak dibahas mengenai permasalahan dalam pengkodean ini. sehingga dalam penggunaan anggaran, anggaran yang sudah di dibuat dalam DPA tidak dapat dieksekusi secara maksimal. Peneliti tergugah untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang terjadi didukung dengan teori-teori dan data yang mendukung dalam penelitian ini. Untuk judul penelitian yang akan diangkat oleh peneliti yaitu **“Penyerapan Anggaran Belanja Pada Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun 2022”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang didapatkan dari penelitian ini dengan berlandaskan pada latar belakang penelitian diatas, meliputi:

1. Penyerapan anggaran di Kantor Kecamatan Cikijing belum maksimal terserap untuk anggaran tahun 2022
2. Perbandingan penyerapan anggaran tahun 2021 dengan 2022 mengalami penurunan kurang lebih 4%
3. Terdapat permasalahan dalam perencanaan anggaran pada saat pengkodean belanja berdasarkan jenis-jenis belanjanya

4. Pada saat pembahasan anggaran, tidak dimanfaatkan dengan baik untuk membahas permasalahan dalam pengkodean belanja yang belum tuntas.
5. Dampak dari perencanaan anggaran dan pembahasan anggaran yang belum maksimal, pada pelaksanaannya terdapat kendala sehingga anggaran tidak dapat digunakan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah yang didapat dari penelitian ini dengan berlandaskan pada latar belakang yang mencoba memaparkan permasalahan yang didukung dengan data, meliputi:

1. Bagaimana perencanaan anggaran di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka tahun 2022?
2. Bagaimana proses dalam membahas anggaran di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka tahun 2022?
3. Bagaimana proses dalam mengadakan jasa dan barang/tender di Kecamatan Cikijing kabupaten Majalengka tahun 2022?
4. Bagaimana Penggunaan anggaran di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka tahun 2022?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, berlandaskan pada rumusan masalah diatas meliputi:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana perencanaan anggaran di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka tahun 2022

2. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses dalam membahas anggaran di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka tahun 2022.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses dalam mengadakan jasa dan barang/tender di Kecamatan Cikijing kabupaten Majalengka tahun 2022.
4. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penggunaan anggaran di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka tahun 2022.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini meliputi:

1. Teoretis
 - a. Peneliti berharap dengan adanya penelitian mengenai Penyerapan Anggaran Belanja di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka ini, dapat mengembangkan keilmuan di bidang Administrasi Publik.
 - b. Peneliti juga berhadap dengan adanya penelitian ini dapat berguna untuk peneliti yang akan datang digunakan sebagai acuan mengenai Penyerapan Anggaran.
2. Praktis
 - a. Dengan adanya penelitian mengenai penyerapan anggaran memiliki manfaat bagi peneliti sendiri, karena jika di kampus peneliti hanya memahami sekilas namun dengan penelitian ini peneliti berusaha memahami secara lebih mendalam lagi bagaimana siklusnya, problematika yang umumnya terjadi.
 - b. Penelitian yang dilakukan peneliti mengenai penyerapan anggaran semoga dengan ini pemerintah khususnya aparaturnya Kecamatan Cikijing Kabupaten

Majalengka dapat menyerap anggaran yang tersedia dengan lebih baik lagi sehingga dapat mewujudkan tujuan dari Kecamatan Cikijing sendiri.

F. Kerangka Pemikiran

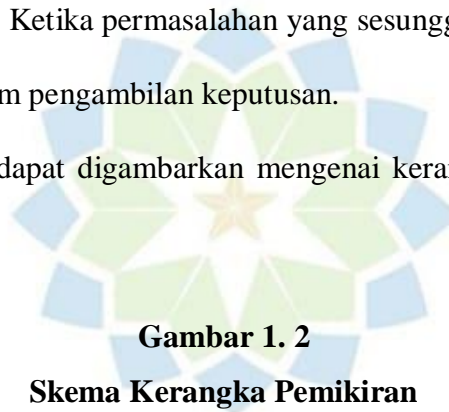
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, diharapkan dapat memecahkan permasalahan dan membuat penelitian menjadi lebih terarah. Penelitian yang dibahas berkenaan dengan penyerapan anggaran belanja Pada Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka tahun 2022. Penyerapan anggaran dapat didefinisikan lebih mudah sebagai realisasi atau pencairan anggaran sebagaimana terdapat dalam LRA (Laporan Realisasi Anggaran), penyerapan anggaran yang rendah kurang lebih memiliki dua sudut pandang. Yang pertama, perbandingan realisasi dengan yang dianggarkan di akhir tahun. Yang kedua, penyerapan anggaran yang tidak proporsionalitas. (Halim, 2017: 92). Namun hal ini dapat dikaitkan dengan faktor – faktor yang menjadi sebab rendahnya anggaran yang terserap meliputi: perencanaan anggaran yang lemah, proses membahas anggaran yang lama, proses tender yang lamban, serta adanya rasa takut dalam menggunakan anggaran (Halim, 2017: 98).

Teori faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran dari (Halim 2017), peneliti memiliki alasan tersendiri untuk menggunakan teori tersebut. Hal ini disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dalam meneliti permasalahan yang terjadi. Hal ini didukung dalam wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti, bahwa sanya permasalahan yang timbul salah satunya karena lemahnya perencanaan anggaran Pada Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka tahun 2022. Dapat dilihat

juga dari Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Cikijing tahun 2022, bahwa serapan anggaran Kecamatan Cikijing ini belum maksimal terealisasi. Bahkan serapan anggaran di Kecamatan Cikijing mengalami penurunan prosentase serapan anggarannya dari tahun 2021, kurang lebih mengalami penurunan sebanyak 4%.

Karena permasalahan yang terjadi ini, peneliti menggunakan teori dari Abdul Halim. Dengan harapan dapat menelaah secara lebih mendalam mengenai permasalahan yang sesungguhnya berkenaan dengan penyerapan anggaran di Kecamatan Cikijing ini. Ketika permasalahan yang sesungguhnya telah terungkap, akan memudahkan dalam pengambilan keputusan.

Secara sederhana dapat digambarkan mengenai kerangka pemikiran supaya lebih mudah dipahami:



Gambar 1. 2

Skema Kerangka Pemikiran

INPUT



Indikator Masalah Penyerapan Anggaran Belanja Pada Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun 2022 :

1. Penyerapan anggaran di Kantor Kecamatan Cikijing belum maksimal terserap untuk anggaran tahun 2022
2. Perbandingan penyerapan anggaran tahun 2021 dengan 2022 mengalami penurunan kurang lebih 4%
3. Terdapat permasalahan dalam perencanaan anggaran pada saat pengkodean belanja berdasarkan jenis-jenis belanjanya
4. Pada saat pembahasan anggaran, tidak dimanfaatkan dengan baik untuk membahas permasalahan dalam pengkodean belanja yang belum tuntas.
5. Dampak dari perencanaan anggaran dan pembahasan anggaran yang belum maksimal, pada pelaksanaannya terdapat kendala sehingga anggaran tidak dapat digunakan.

